



Kasus Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Denpasar **Depak Pengacara, Mantan Sekwan Ngotot Maju Sendiri**



DENPASAR, NusaBali
Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha, 61, depak kuasa hukumnya, I Ketut Rinata. Terdakwa yang juga Bendesa Adat Tangeb, Kecamatan Mengwi, Badung ini pilih maju sendiri dalam sidang kasus korupsi Perjalanan Dinas DPRD Denpasar 2013-2014 yang diduga

Mantan Sekwan DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha.

Bersambung ke Hal-15 Klor 5

Edisi : Rabu, 26 April 2017

Hal : 1 dari 5



Depak Pengacara, Mantan Sekwan...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

rugikan negara Rp 2,2 miliar, di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Kepastian IGN Rai Sutha cabut kuasa pengacaranya, Ketut Rinata, ini disampaikan salah satu jaksa Kejari Denpasar, Dewa Arya Lanang Raharja, saat ditemui NusaBali di PN Denpasar, Selasa (25/4). Dewa Lanang yang juga anggota Tim JPU dalam kasus perjalanan dinas ini ini mengatakan, semua ini terungkap saat dilakukan pelimpahan dari Kejari Denpasar ke PN Denpasar, Kamis (20/4) lalu.

Saat pelimpahan ke PN Denpasar hari itu, Rai Sutha diminta menghadirkan pengacaranya. Sebab, sesuai KUHP, terdakwa harus didampingi pengacara saat pelimpahan ke pengadilan. Namun, Rai Sutha saat itu tidak mampu menghadirkan pengacaranya, Ketut Rinata. Bahkan, Rai Sutha kala itu mengatakan tidak mau lagi menggunakan jasa pengacara terdahulu. Rai Sutha pun pilih membuat surat pemutusan kuasa pengacaranya, Ketut Rinata. "Rai Sutha menulis tangan surat pemutusan kuasa itu dan diserahkan ke jaksa," beber Dewa Lanang.

Ketika ditanya apakah akan menggunakan pengacara lainnya, menurut Dewa Lanang, Rai Sutha menjawab tidak mampu menghadirkan pengacara dan memilih maju

sendiri menghadapi kasusnya di persidangan. Namun, karena berdasarkan aturan terdakwa harus didampingi pengacara, Kejari Denpasar akhirnya menunjuk advokat I Komang Darmayasa untuk mendampingi Rai Sutha selama pelimpahan ke pengadilan. "Jadi, kami tunjuk pengacara untuk mendampingi selama pelimpahan. Dan, itu disetujui oleh Rai Sutha sendiri," terang Dewa Lanang.

Setelah pelimpahan selesai dari kejaksaan ke pengadilan selesai, menurut Dewa Lanang, pihaknya tidak tahu lagi kelanjutan kuasa hukum terdakwa Rai Sutha. Pihaknya menyerahkan kewenangan penunjukan pengacara untuk terdakwa Rai Sutha kepada majelis hakim yang akan memimpin sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. "Nanti biar hakim yang menunjuk di sidang. Karena dalam perkara korupsi kan (terdakwa) harus didampingi pengacara," katanya.

Sementara, Komang Darmayasa membenarkan dirinya sempat mendampingi Rai Sutha saat pelimpahan ke pengadilan, Kamis lalu. Namun, Darmayasa mengatakan hanya mendampingi terdakwa saat pelimpahan saja. Sampai saat ini tidak ada surat kuasa lanjutan untuk mendampingi terdakwa Rai Sutha hingga ke persidangan. "Saya hanya mendampingi saat pelimpahan saja," terang Darmayasa saat

dihubungi NusaBali per telepon, Selasa kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Ketut Rinata mengaku sampai saat ini belum menerima surat pemutusan kuasa dari kliennya, IGN Rai Sutha. Ketut Rinata sendiri merupakan pengacara penunjukan langsung dari Sekretariat DPRD Denpasar untuk mendampingi mantan Sekwan. "Saya belum menerima surat pemutusan kuasa dari Rai Sutha," jelas Rinata.

Sementara itu, Kejari Denpasar telah menunjuk 5 jaksa untuk mengawal kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas DPRD Kota Denpasar yang menyeret mantan Sekwan IGN Rai Sutha sebagai terdakwa, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar nanti. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini akan diketuai langsung Kasi Pidsus Kejari Denpasar, Tri Syahrhu. "Ya, sudah ditunjuk lima jaksa untuk perkara ini," tegasnya jaksa Tri Syahrri, Selasa kemarin.

IGN Rai Sutha sendiri terseret kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas DPRD Denpasar dengan kerugian negara sekitar Rp 2,2 miliar, bersama mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) I Gusti Made Patra. Bahkan, terdakwa IGM Patra sudah divonis 1 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis, 30 Maret 2017 malam. **rez**

Edisi : Rabu, 26 April 2017

Hal : 5



Penanganan Tanggap Darurat Bencana Diragukan

★ Dana Terpakai Minim

SINGARAJA, NusaBali

Perbaikan akibat kerusakan bencana alam yang sempat melanda puluhan desa di Buleleng, diragukan tuntas sepenuhnya. Masalahnya, dana tanggap darurat bencana yang dikucurkan Pemkab Buleleng, justru belum terserap maksimal. Di satu sisi tenggang waktu tanggap darurat bencana sudah berakhir pada 14 April 2017 lalu.

Lembaga DPRD Buleleng pun berencana memanggil BPBD terkait penanganan kerusakan akibat bencana. Data dihimpun Selasa (25/4), bencana alam berupa banjir badang dan longsor yang terjadi pada 12 Februari 2017 lalu, menimpa 45 desa dan 3 kelurahan di 9 Kecamatan yang ada. Kala itu, total kerugian ditaksir mencapai Rp 145 miliar. Pemkab Buleleng saat itu langsung kucurkan dana bencana melalui Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 2.250.000.000. Namun setelah dievaluasi, ternyata kucuran dana itu dirasa tidak cukup. Diperkirakan penanganan tanggap darurat bencana masih membutuhkan dana hingga Rp 11.600.000.000. Kebutuhan dana ini bersumber dari laporan BPBD sebesar Rp 1,6 miliar; kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 7.895.900.000, Dinas Pertanian

Rp 1.104.000.000, dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp 1 miliar.

Melalui pembahasan, lembaga DPRD Buleleng akhirnya sepakat kebutuhan dana itu diambilkan dengan cara rasionalisasi anggaran. Dana yang terkoreksi adalah dana penyertaan modal yang sediakanya diberikan kepada PDAM dan BPD Bali. Selain menambah dana tanggap darurat bencana, jangka waktu penanganan juga diperpanjang hingga 14 April 2017.

Dalam laporan BPDB Buleleng yang disampaikan kepada Bupati, ternyata BPBD mengaku setelah dilakukan assesment ke seluruh lokasi bencana, kebutuhan dana dalam masa tanggap darurat bencana hanya sebesar Rp 3.931.000.000. Laporan BPBD juga merinci penggunaan dana tersebut rinciannya penanganan infrastruktur air bersih sebesar Rp 1.825.770.000, kemudian infrastruktur jembatan sebesar Rp 450 juta, infrastruktur sumber daya air Rp 300 juta, infrastruktur revetment pantai Rp 956.130.000, biaya sewa alat berat Rp 200 juta, dan terakhir biaya bahan baku bangunan Rp 200 juta.

Terkait tidak maksimalnya pemanfaatan dana tersebut, Lembaga DPRD Buleleng berencana minta pertanggungjawaban BPBD. Masalahnya lembaga dewan masih menerima

informasi kerusakan akibat bencana yang belum tertangani. "Ini jelas meragukan, kenapa dulu usulan kebutuhan dana tanggap darurat begitu besar. Kami harus berpikir untuk ikut mencarikan dana dan menyetujui usulan kebutuhan dana itu. Tetapi ternyata sekarang yang terpakai sedikit," kata Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna yang dikonfirmasi Selasa kemarin.

Supriatna mengaku akan membahas di internal Badan Anggaran (Banggar) sebelum meminta pertanggungjawaban dari eksekutif terkait penggunaan dana tersebut. "Kita secepatnya agendakan pembahasannya, karena kita khawatir belum semua kerusakan ditangani," imbuh politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Buleleng I Made Subur menyebut ada beberapa pertimbangan penggunaan dana tanggap darurat tersebut antara lain, beberapa sarana dan prasarana yang sempat rusak akibat bencana sudah berfungsi kembali, kemudian perbaikan kerusakan fasilitas umum tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu pengerjaan pada masa tanggap darurat. "Di samping itu ada infrastruktur rumah yang rusak, akan diusulkan ke BPBD Provinsi Bali," kata Subur dalam laporannya. **k19**

Edisi : RUMU, 26 APRIL 2017

Hal : 14